



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 31 Januari 2013

Halaman: 12

Kota Kesulitan Bangun Rusunawa

Bhekti Suryani

JOGJA—Kota Jogja kesulitan membangun rumah susun sederhana sewa bagi warga miskin meski kebutuhannya sangat tinggi.

Salah satu penyebabnya, kawasan wedi kengser yang semestinya adalah tanah negara, telah dimiliki warga. Kepala Seksi Permukiman Bidang Permukiman dan Sa-

luran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja, Hanida Yuswahadi, Rabu (30/1) menyebutkan, saat ini di Kota Jogja baru ada tiga rusunawa. Kendati kebutuhan permukiman jenis ini sangat mendesak, Pemkot mengaku kesulitan membangun rusunawa karena terkendala lokasi.

Pemkot Jogja menurutnya sengaja tak mengajukan pembangunan rusunawa ke Pemerintah Pusat. Sebab, membangun permukiman jenis ini minimal harus se-

luas 1.000 meter persegi. "Itu bukan perkara mudah. Persoalan ketersediaan lahan bakal jadi hambatan utama. Biasanya kalau dari pusat selama daerah siap dengan lahan mereka mau membangun," terang Hanida.

Ia menceritakan sulitnya membebaskan lahan untuk pembangunan rusunawa yang sudah-sudah. Pembangunan rusunawa di daerah Juminahan misalnya, Pemkot harus memaksa penduduk agar pindah lantaran permukiman di sekitar sungai tersebut sudah begitu padat

dan kumuh. Selama pembangunan digarap, Pemkot harus menyediakan rumah kontrakan untuk 10 Kepala Keluarga (KK) yang tergusur sebelum mereka menempati hunian baru.

Padahal kata Hanida, lahan di sekitar sungai tersebut adalah Tanah Kraton atau wedi kengser alias tanah negara yang semestinya lebih mudah untuk dibebaskan. "Setelah kami cek ke kelurahan banyak tanah wedi kengser itu sudah disertifikatkan menjadi hak milik jadi harus membeli ke mere-

nya. Padahal setidaknya butuh 1.500 meter persegi. Luas sebesar itu sudah mepet, enggak ada ruang publik atau sarana umum lainnya," paparnya.

Membeli lahan di Kota Jogja begitu mahal karena daerah ini sangat kecil seluas 32,5 kilometer persegi. Padahal dari tahun ke tahun permukiman padat makin bertambah dan kekumuhan semakin menyebar.

Kimpraswil mencatat, kantong kekumuhan terutama berada di sepanjang kali seperti di Kali Code, Gad-

jah Wong dan Winongo. "Di sepanjang sungai itu paling padat dan kumuh, kami memang baru berencana mendata berapa tingkat kepadatan dan titik-titik wilayah kumuh di sana serta jumlah penduduknya," tuturnya.

Pembangunan rusunawa sedianya mendesak dibangun di dekat sungai. Namun saat ini hanya ada tiga unit rusunawa di Jogja, sangat sedikit bila dibanding kondisi kepadatan kota.

Permintaan rusunawa juga sangat tinggi. Di Rusunawa Graha Bina Harapan

(GBH) Juminahan misalnya, dari total 68 unit kamar yang disewakan semua sudah penuh. Daftar pengantre yang ingin menyewa rusunawa mencapai puluhan orang dengan masa tunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

"Di sini kan batas maksimal bisa tinggal enam tahun. Jadi yang daftar sekarang ini masih mengantre dulu tunggu kalau ada yang keluar baru masuk," kata Arie Christiyen, Manager GBH kepada *Harian Jogja* beberapa waktu lalu. (bhekti@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005